BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional pasca perang dingin, Semenanjung Korea tidak hanya telah menjadi pusat wacana keamanan Asia Timur, para ilmuwan terutama dengan perspektif yang mengarah pandangannya ke barat mendiagnosis bahwa pengembangan institusionalisasi regional di Asia Timur Laut, tidak adanya kepemimpinan visioner di Amerika Serikat dan Tiongkok, dan strategi bertahan hidup Korea Utara yang merusak diri sendiri sulit untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea (Park, 2011:1).

Semenanjung Korea dianggap sebagai suatu kawasan strategis dalam hubungan internasional di Asia Timur dimana Semenanjung Korea memiliki arti yang cukup penting dalam kepentingan nasional bagi keempat negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat serta untuk membentuk dan mempertahankan *balance of power* di wilayah Asia Timur (Mas'oed, 2005: 18-19).

Stabilitas keamanan di Semenanjung Korea saat ini tidak kondusif semua itu tidak terlepas dari ancaman yang diberikan oleh Korea Utara meskipun antara Korea Selatan dan Korea Utara sudah terjadi kesepakan perjanjian gencatan senjata atau *armistice aggrement*, namun secara teknis kedua negara tersebut masih dalam status berperang. Melihat akan hal itu Korea Selatan perlu untuk

memiliki pihak yang dapat melindungi negaranya bila sewaktu-waktu perang dengan Korea Utara akan pecah kembali (Mas'oed, 2005:1).

Antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat melakukan aliansi yaitu aliansi pertahanan bersama yang mengatur jika salah satu negara diserang oleh pihak ketiga maka pihak lain akan bertindak, dan juga kesepakatan meliputi bantuan militer untuk kebijakan salah satu negara sebagai contoh Korea Selatan turut membantu Amerika Serikat dalam kampanye perangnya di Vietnam dan Irak. Sejak saat itu Amerika Serikat adalah negara pelindung utama bagi Korea Selatan dan juga Korea Selatan sebagai basis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html [10/06/ 2017]).

Aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan keamanan di Semenanjung Korea. Kerentanan Korea Selatan terhadap serangan dari Korea Utara, dan kepentingan strategisnya sebagai benteng melawan penyebaran agresi komunis pada awal perang dingin, merajut kebutuhan keamanan Amerika dan Korea Selatan bersama-sama. Aliansi tersebut memberikan jaminan keamanan kepada Korea Selatan yang lemah sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat untuk pembelaannya (Synder, 2009:3).

Secara historis, setiap kali terjadi perubahan politik besar di wilayah Asia Timur, Semenanjung Korea selalu menjadi titik kritis. Kebenaran historis ini tidak berubah di era pra-modern atau bahkan setelah perkembangan hubungan internasional di Asia Timur di era modern. Sejarah tidak mungkin terulang lagi,

karena realitas hubungan internasional post-modern abad kedua puluh satu sangat berbeda dengan hubungan internasional masa lalu untuk negara-negara Asia Timur manapun yang menggunakan konflik militer. Namun, kawasan ini masih berada di bawah lingkungan diplomatik yang bermusuhan karena sengketa historis dan teritorial serta perlombaan senjata intensif (Park, 2011:223).

Dalam keadaan seperti itu, secara strategis mudah untuk memahami mengapa Korea Selatan beraliansi dengan Amerika Serikat, sebuah negara hegemonik global di luar kawasan Asia Timur, sebagai mitra aliansinya. Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat hampir berusia 60 tahun. Amerika Serikat secara tradisional berinteraksi dengan Asia Timur melalui serangkaian pengaturan bilateral. Dibandingkan dengan aliansi diplomatik unik yang dimiliki Korea dengan Tiongkok selama ribuan tahun, sejarah aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat tidak jauh berbeda namun kenyataan bahwa mitra aliansi Korea bukan dengan negara Asia Timur adalah titik positif. Kecuali Korea secara independen telah menjadi negara yang kuat setelah membangun pemerintahannya pada tahun 1948, sebuah aliansi dengan Tiongkok atau Jepang tidak akan sama menguntungkannya dengan aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat saat ini, atau aliansi semacam itu dipandang sebagai satu kekuatan yang sama dan lebih dari segalanya, aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat adalah aset diplomatik yang berharga karena memungkinkan Korea untuk mengejar kepentingan nasionalnya secara terpisah di tingkat Asia Timur Laut dan di tingkat global (Park, 2011:223).

Masalahnya adalah berdasarkan alasan apa aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat akan berlanjut di masa depan. Pada pertemuan puncak pertama mereka,

presiden Lee Myung-bak dan Barack Obama mengadopsi visi bersama untuk aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat, yang menyerukan untuk membangun kemitraan strategis abad kedua puluh satu yang lebih luas di ranah politik, ekonomi, budaya, di luar arena keamanan. Sejauh menyangkut kepentingan keamanan nasional Korea, aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat prioritas tertinggi dalam strategi keamanan nasional Korea Selatan. Tatanan internasional masa depan telah ditandai sebagai jaringan kompleks atau transformasi kompleks. Di lingkungan seperti itu, sebuah negara seperti Korea Selatan, dikelilingi oleh tetangga yang lebih kuat, harus mengejar strategi nasional yang memanfaatkan manfaat jaringan yang kaya, beragam, dan kompleks di semua wilayah keamanan nasional. Dalam hal ini, hubungan dengan Amerika Serikat diambil sebagai prioritas utama (Park, 2011:224).

Bahkan selama tahun-tahun penuh gejolak pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun, aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat bertahan dan bahkan diperkuat dan dikonfigurasi ulang dengan cara yang ambisius, Korea Selatan mengirim lebih banyak tentara ke Irak daripada di negara lain selain Amerika Serikat dan Inggris, Korea Selatan dan militer Amerika Serikat telah menyesuaikan diri dengan rekonfigurasi besar penempatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan, dan kedua negara telah menandatangani dan meratifikasi sebuah perjanjian perdagangan bebas bilateral. Isu utama yang dihadapi aliansi saat ini adalah disonansi strategis mengenai Korea Utara, namun ada tantangan lain yang dihadapi aliansi tersebut, bangkitnya Tiongkok, ancaman terhadap tatanan internasional yang diajukan oleh teroris, dan proliferasi senjata pemusnah

massal, serta perlu merestrukturisasi aliansi untuk memenuhi perubahan realitas didalam negeri dan internasional di kedua negara (Park, 2011:224).

Dari perspektif Korea Selatan, hubungan dengan Tiongkok tidak terlalu penting dibanding hubungan Korea Selatan-Amerika Serikat. Untuk masa depan Asia Timur yang lebih makmur dan stabil, Korea, Tiongkok, dan Amerika Serikat harus menemukan kesamaan untuk saling memahami maksud masing-masing dengan cara yang konstruktif. Secara khusus, Korea Selatan dan Amerika Serikat harus berupaya mengurangi konotasi negatif yang terkait dengan istilah aliansi strategis. Banyak orang Tiongkok memahami konsep kemitraan berbasis nilai yang dimaksudkan untuk mengecualikan negara-negara dengan nilai yang berbeda, khususnya Tiongkok. Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat tidak bertujuan untuk mencegah meningkatnya aktifitas Tiongkok sebaliknya, mereka bermaksud untuk mengatasi ancaman keamanan komprehensif masyarakat internasional di masa depan (Park, 2011:224-225).

Situasi stabilitas politik dan keamanan di semenanjung Korea saat ini masih belum memperlihatkan keadaan yang membaik. Masalah utama di semenanjung ini pada umumnya adalah ancaman nuklir Korea Utara. Kegiatan reaktor nuklir yang tidak transparan menjadikan situasi di semenanjung Korea menjadi tidak menentu (Mas'oed, 2005:1).

Selama rentang waktu 23 tahun (antara 1993 hingga 2016) Korea Utara kembali melakukan berbagai tindakan-tindakan kontroversial yang menimbulkan suatu krisis di Semenanjung Korea. Tercatat Korea Utara melakukan beberapa kali uji coba misil/rudalnya. Uji coba pertama berlangsung pada bulan Mei 1993.

Korea Utara sukses meluncurkan misilnya, yang bernama Nodong. Kemudian pada bulan Agustus 1998, Korea Utara melakukan uji coba misil Taepodong-1 nya. Pada Februari 2003, Korea Utara meluncurkan misilnya ke laut Jepang pada hari yang sama ketika Presiden Roh Moo-Hyun (Korea Selatan) dilantik. Pada Juli 2006, Korea Utara menembakkan tujuh misilnya, termasuk diantaranya Taepodong-2, pada Desember 2012 Korea Utara sukses meluncurkan Kwangmyongsong-3 Unit 2 yaitu stasiun pengamatan bumi dan meteorologi, Pada tahun 2014 Korea Utara meluncurkan misilnya Nodong, berlanjut pada tahun 2016 Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam, Pukkuksong-1 ke zona identifikasi pertahanan udara Jepang dengan jangkauan 500 kilometer dan ketinggian yang sama. Korea Utara tengah mengembangkan teknologi untuk dapat melakukan serangan kedua dengan menggunakan teknologi sistem peluncuran vertikal yang lebih baik dan roket berbahan bakar padat (http://cns.miis.edu/pubs/npr/vol09/92/ 92 samore.html [10/04/2017]).

Banyak kalangan pejabat pemerintahan Amerika Serikat berpendapat bahwa apabila program pengembangan nuklir dan teknologi misil Korea utara tidak segera dihentikan maka dalam beberapa tahun kedepan Korea Utara akan memiliki senjata nuklir yang sama dengan senjata nuklir yang dimiliki oleh Tiongkok, Perancis dan Inggris. Senjata nuklir yang mengandung plutonium dan HEU (*highly-enriched uranium*) yang dibawa dengan rudal balistik jenis Taepodong-2 mempunyai daya jelajah yang dapat mencapai hampir semua negara bagian di Amerika Serikat (http: //cns. miis. edu/ pubs/ npr/ vol09/ 92/ 92 samore. Html [10/ 04/2017]).

Kekhawatiran inilah yang mengusik pemerintah Amerika Serikat untuk segera menghentikan program nuklir Korea Utara. Perkembangan program nuklir Korea Utara juga mengancam keberadaan rezim ”*non-proliferasi global*” yang berlandaskan perjanjian pelarangan pengembangan persenjataan nuklir (*Nuclear Non-Prolefiration Treaty/NPT)* diprakarsai, salah satunya oleh Amerika Serikat (http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html[10/04/2017]).

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sempat membaik pada tahun 1991, ketika muncul *“Agreement on Reconciliation, Non aggression and Exchanges and Cooperation between the South and the North*” yang sering dikenal sebagai “*Basic Agreement”* yang mengakui niatan baik reunifikasi kedua negara tersebut. Pada tahun 1992 juga muncul kesepakatan *“Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula”* meski sudah muncul beberapa kesepakatan dalam menjalin hubungan baik kedua negara, arus politik domestik Korea Utara dan Korea Selatan yang berbeda menyebabkan pasang surut hubungan keduanya (http://articles.cnn.Com2010-05-25/ world/ n. korea. Threats_ 1_ south- korean- president- lee- north- south- korean- peninsula? _s =PM: WORLD [10/04/2017]).

Perbedaan pandangan terhadap keberadaan nuklir antara Korea Utara dan Selatan serta meninggalnya presiden Korea Utara pada masa itu, Kim Il Sung, menjadi salah satu faktor pasang surut hubungan kedua negara. Sejak dikeluarkannya kesepakatan *“Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula”,* muncul beberapa fenomena yang membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk. Pada tahun 2009, Korea Utara

secara terang-terangan melakukan uji coba rudal balistik di sekitar laut Jepang. Hal ini membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang sebelumnya membaik malah berbalik menjadi buruk. Peran negara luar kawasan seperti Amerika mulai gencar dilakukan dengan terbentuknya *UN Security Council Resolution (UNSCR)* pada tahun 2009. Pada tahun 2010, kapal perang Korea Selatan ditemukan tertembak rudal dari Korea Utara dan pulau Yeonpyeong diserang oleh militer Korea Utara. Insiden ini telah membuat hubungan kedua negara semakin buruk dan bahkan menutup komunikasi bilateral. UNSCR kemudian memberikan rekomendasi kedua negara tersebut antara lain:

1. Bahwa semua hubungan diplomatik antar negara Korea dihentikan dan insiden pada tahun 2010 akan di selesaikan dalam hukum perang.
2. Dialog antara Korea Utara dan Korea Selatan di hentikan selama masa Lee Myung-bak.
3. Semua komunikasi antar kedua negara dihapus.
4. Kapal dan pesawat Korea Selatan dilarang Melewati wilayah perairan dan udara Korea Utara (http://articles.cnn.Com2010-05-25/ world/ n. korea. Threats_ 1_ south- korean- president- lee- north- south- korean- peninsula? _s =PM: WORLD [10/04/2017]).

Di tengah ancaman serangan nuklir Korea Utara, angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Korea Selatan memulai latihan bersama di laut Jepang. Dalam pernyataan bersamanya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-Young mengatakan, rangkaian latihan militer ini merupakan pesan yang jelas untuk Korea Utara. Korea Utara

harus menghentikan perilaku agresifnya, dari hasil investigasi internasional atas insiden penembakan kapal perang Korsel di dekat perbatasan perairan laut kuning, Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Pyongyang bertanggung jawab atas insiden ini.

Latihan perang bersama AS-Korsel yang direncanakan berlangsung empat hari mengerahkan kekuatan inti armada ke 7 Amerika serikat. Armada ke 7 ini juga di kenal memiliki daya tempur terkuat di dunia. Di dalam armada ke 7 ini diantaranya kapal induk bertenaga nuklir USS George Washington, kapal kruiser rudal Cowpens, dan kapal perang Shilo. Dalam latihan ini, juga di ikut sertakan pesawat pengintai raksasa Amerika Serikat Joint Stars, berperan sebagai pengintai gerakan artileri dengan akurat di pantai dan di darat Korea Utara. Di pihak Korea Selatan mereka mengerahkan 6 kapal perang dan 2 pesawat anti kapal selam yang ikut berpartisipasi dalam latihan militer ini. Komandan PBB dan pimpinan militer Amerika Serikat menyebutkan latihan yang berlangsung Minggu dini hari itu juga melibatkan 8.000 orang tentara dari kedua negara. Semula latihan yang dimulai Minggu dini hari itu akan digelar di laut kuning (Laut barat) yang sensitif bagi Korea Utara namun kemudian dipindahkan ke Laut Jepang setelah Tiongkok protes. Namun latihan-latihan berikutnya akan digelar didua perairan tersebut. Korea Utara memandang latihan bersama Amerika Serikat-Korea Selatan ini sebagai ancaman. Karenanya, Pyongyang mengancam akan meresponnya dengan serangan senjata nuklir. Ancaman terhadap latihan militer bersama kedua negara sudah berulang kali disuarakan Korea Utara. Komisi Pertahanan Nasional Korea utara menyebut semua latihan militer Amerika Serikat-Korea Selatan ini sebagai

manuver perang dan provokasi untuk melumpuhkan Pyongyang dengan kekuatan senjata. Militer Korea Selatan sendiri terus memantau secara seksama kondisi dan pergerakan pasukan Korea Utara (http://internasional.kompas.com/ read/ 2010/ 07/25/07251948/ AS-Korsel. Mulai. Latihan.Gabungan.Militer [10/04/2017]).

Pada tanggal 7 November 1978 Komando Militer Gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat/*CFC* (*Combined Forces Comand*) dibentuk, CFC diperintahkan oleh jenderal Amerika Serikat bintang empat, dengan seorang jenderal angkatan darat Korea Selatan bintang empat sebagai wakil komandan. Sepanjang struktur komando, struktur kepemimpinan mudah ditebak, jika kepala bagian staf adalah orang Korea, wakilnya adalah orang Amerika dan sebaliknya. Semua komponen CFC terintegrasi secara taktis melalui perencanaan bersama dan latihan bersama (http://www. usfk.mil/ About/Combined-Forces-Command/[10/04/2017]).

CFC memiliki kontrol operasional terhadap lebih dari 600.000 personil militer aktif dari semua layanan dan dari kedua negara. Di masa perang, augmentasi bisa mencakup sekitar 3.5 juta cadangan pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Jika Korea Utara menyerang, CFC akan memberikan pertahanan terkoordinasi melalui komando pasukan angkatan laut, darat, udara dan kombinasi pasukan marinir serta gabungan pasukan sukarela (http://www.usfk.mil/ About/Combined-Forces-Command/[10/04/2017]).

Pada tingkat unit, pasukan Korea dan Amerika Serikat sering mendapat peringatan pemberitahuan, pengamanan, dan inspeksi kesiapan operasional yang memastikan kesiapan tempur. Kedua negara sedang mengejar program

modernisasi militer untuk menunjang kesiapan pasukan dalam medan pertempuran, serta menyakinkan Korea Utara bahwa segala agresi atau ancaman yang mereka lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Korea Selatan membuat langkah dalam perbaikan peralatan militer melalui industri pertahanan dalam negeri yang berkembang pesat, serta pembelian dari luar negeri. Upaya Amerika Serikat menuju modernisasi mencakup sistem senjata yang lebih baru, lebih kuat, kemampuan alutsista yang besar. Singkatnya, Komando Militer Gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat mencerminkan komitmen timbal balik Republik Korea dan Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dan keamanan, kemauan dan kemampuan untuk mengambil komitmen tersebut ke dalam pertempuran (http://www.usfk.mil/ About/Combined-Forces-Command/[10/04/2017]).

Aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan di namakan *United States Forces Korea (USFK)* dibentuk pada tanggal 01 Juli 1957. USFK dideskripsikan sebagai cabang kesatuan dari komando Amerika Serikat Pasifik (USPACOM), yang dapat disebarkan untuk menyerang negara (dunia) ketiga dikawasan termasuk Rusia dan Tiongkok. Secara resmi terdapat 28.500 tentara Amerika Serikat dibawah kekuasaan USFK. Gambaran terakhir dari kemenhan Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa terdapat 37.000 tentara Amerika Serikat dibawah USFK yang sedang berada di Korea Selatan (per April 2013) (http://www.usfk.mil [10/04/2017]).

Setiap tahun, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara pilihan dari Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pelatihan gabungan, kombinasi gabungan yang dirancang untuk mempertahankan

Republik Korea, melindungi kawasan ini, dan memelihara serta meningkatkan stabilitas pada Semenanjung Korea. *Ulchi-Freedom Guardian*, *Key Resolve*, dan *Foal Eagle*, adalah tiga latihan yang dilakukan oleh USFK. (http://www. usfk.mil [10/04/2017]).

Ulchi-Freedom Guardian (UFG) adalah latihan komando yang melatih personil komando dan komponen utama pasukan gabungan, bawahan dan staff dengan menggunakan simulasi komputer yang bertujuan untuk meningkatkan sikap defensive dua negara sekutu, UFG mengintegrasikan latihan yang berfokus pada prosedur untuk transisi perang dan usaha untuk mendapat dukungan dari pemerintah. UFG biasanya menggabungkan komponen latihan manajemen krisis perang dan seminar kepemimpin senior/*Senior Leader Seminar* (SLS) yang dirancang untuk mendorong diskusi tingkat tinggi mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan manajemen krisis perang. Latihan tersebut berujung pada tingkat pimpinan masing-masing negara (http://www. usfk.mil [10/04/2017]).

Key Resolve (KR) latihan gabungan ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi, dan memperbaiki koordinasi, prosedur, rencana dan sistem yang mungkin diperlukan untuk melakukan operasi militer oleh pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. KR adalah simulasi latihan yang didorong untuk melihat pertahanan Korea Selatan dan kemampuan Amerika Serikat dalam mempertahankan pasukannya (http://www. usfk.mil [10/04/2017]).

Foal Eagle (FE) adalah serangkaian gabungan latihan lapangan, dilakukan setiap tahun oleh angkatan bersenjata Republik Korea dan angkatan bersenjata Amerika Serikat di bawah naungan komando pasukan gabungan. Ini adalah salah

satu latihan militer terbesar yang dilakukan setiap tahun di dunia yang bersifat defensif dan dilakukan terutama sebagai latihan stabilitas keamanan. FE menguji kemampuan Korea Selatan untuk mempertahankan dirinya sendiri, dibantu oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat, dan ini latihan yang terdiri dari operasi pertahanan keamanan, operasi khusus, serangan darat, laut, udara, operasi amfibi (http://www. usfk.mil [10/04/2017]).

Dalam hal ini kepentingan Korea Selatan di Semenanjung Korea adalah mencakup kepentingan politik, keamanan, ekonomi. Kepentingan politik menjadi kepentingan yang penting terkait dengan penciptaan *prestise* dan persatuan nasional di dalam Korea. Sementara, kepentingan keamanan menjadi penting jika dilihat dari masalah keberadaan nuklir, dan hubungan Korea Selatan yang senantiasa mengalami pasang surut dengan Korea Utara (Park, 2011:216).

Inilah yang menjadi hal mendasar bagi Korea Selatan yaitu berupaya membangun pertahanan yang hebat guna mencapai stabilitas keamanan nasional dari tekanan hingga pertikaian dengan negara lain khususnya Korea Utara. Korea Selatan mengalokasikan 2.6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Angkatan bersenjata Republik Korea atau yang dikenal dengan Korea Selatan didirikan pada 15 Agustus 1948 yang terbagi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara. Markas besar angkatan bersenjata Korea Selatan ini terletak di Seoul. Bagi pria Korea Selatan yang berusia 19 hingga 35 tahun diwajibkan ikut pendidikan militer dalam masa waktu 21 hingga 24 bulan, tergantung cabang militer. Saat ini jumlah personil militer aktif diperkirakan

mencapai 655.000 dan 3.040.000 personil cadangan. Pada tahun 2010, Korea Selatan menambah anggaran militernya menjadi 2,65 dari APBN negara yang jika dirupiahkan menjadi 29,6 trilyun (http://www.kida.re.kr/eng/pcrm/newsletter/ download.asp?newsletter=[10/04/2017]).

Selain itu, masalah keamanan kemudian juga tidak hanya yang terkait dengan masalah nuklir, tetapi juga imbas dari keberadaan nuklir itu sendiri yang kemudian menciptakan masalah seperti ekonomi, serta masalah keamanan energi. Dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, adanya ancaman nuklir mengakibatkan Korea Selatan harus memberikan kompensasi berupa bantuan kepada Korea Utara, dengan jumlah yang tidak bisa dikatakan sedikit. Selanjutnya, terkait masalah ketersediaan energi dan sumber bahan baku, mengingat letak Korea Utara yang stategis, yang mengapit Korea Selatan dengan negara besar seperti Tiongkok dan Rusia, membuat kerjasama energi seperti dengan Rusia akan sangat beresiko jika melalui Korea Utara sebelum terciptanya kondisi yang stabil dan aman (Park, 2011:219).

Kepentingan Tiongkok di Semenanjung Korea tercermin dalam kebijakan lama Beijing tentang tidak ada perang, tidak ada ketidakstabilan, dan tidak ada kekuatan nuklir. Mempertahankan kedamaian adalah prioritas tertinggi Tiongkok. Perang Korea pada awal 1950an, yang mengakibatkan ratusan ribu korban Tiongkok dan komitmen Amerika Serikat yang diperbarui untuk keamanan Taiwan yang berlanjut sampai hari ini. Konflik militer lainnya di semenanjung Korea yang akan menghambat pembangunan ekonomi Tiongkok dan sangat

merusak citra global dengan hubungannya sesama tetangganya dan ini adalah mimpi buruk bagi para pemimpin Tiongkok (Glaser, 2012:1).

Prioritas kedua Beijing adalah menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Ketidakstabilan di Korea Utara, yang dipicu oleh krisis ekonomi atau politik, dapat menciptakan serangkaian konsekuensi negatif. Kecuali Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dapat menutup perbatasan, misalnya, puluhan ribu pengungsi Korea Utara dapat menyeberang ke provinsi timur laut Tiongkok dengan risiko meningkatnya kejahatan, penyakit, dan masalah sosial lainnya di wilayah Tiongkok. Selain itu, kekhawatiran Amerika Serikat mengenai senjata pemusnah massal yang tidak aman di Korea Utara dan ambisi Korea Selatan untuk menyatukan kembali semenanjung tersebut mungkin sesuai untuk mendukung keputusan untuk menyerang zona demiliterisasi, yang mengakibatkan mimpi buruk bagi militer Tiongkok di perbatasan (Glaser, 2012:2).

Menghilangkan isu nuklir tidak termasuk dalam daftar kepentingan Tiongkok di Semenanjung Korea. Tanpa pertanyaan, Tiongkok menentang program nuklir Pyongyang dan lebih memilih sebuah semenanjung bebas nuklir. Namun, orang-orang Tiongkok telah memperjelas bahwa mereka hanya akan mendukung strategi untuk menghapus senjata nuklir Korea Utara yang tidak membahayakan perdamaian dan stabilitas (Glaser, 2012:2).

Meskipun orang-orang Tiongkok tidak melihat akuisisi senjata nuklir Korea Utara sebagai ancaman langsung ke Tiongkok, ada kekhawatiran bahwa persepsi akan ancaman nuklir yang berkembang dapat menyebabkan Korea

Selatan, Jepang, dan bahkan Taiwan mengembangkan kemampuan nuklir di negara masing-masing.

Program nuklir Korea Utara menunjukkan provokasi yang mendorong Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan untuk memperkuat koordinasi pertahanan dan telah menyebabkan Tokyo dan Seoul meningkatkan pertahanan rudal mereka. Perkembangan ini dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan keamanan Tiongkok. Apalagi, jika lebih banyak negara mengembangkan senjata nuklir, perjanjian non proliferasi nuklir bisa runtuh, menyuntikkan ketidakpastian baru ke dalam situasi keamanan di banyak bagian dunia dan merongrong kepentingan Tiongkok. Sebuah nuklir Korea Utara juga menimbulkan bahaya bahwa Pyongyang akan mentransfer bahan nuklir, teknologi, atau pengetahuan kepada negara ketiga atau aktor non-negara, dengan konsekuensi yang tidak terduga di Beijing (Glaser, 2012:3). Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan negara-negara lain kemungkinan akan menekan Tiongkok untuk menghukum Korea Utara dan mendukung langkah-langkah untuk meningkatkan pemeriksaan dan larangan pengiriman Korea Utara. Bergantung pada situasinya, Amerika Serikat bahkan mungkin menyerang Korea Utara, meningkatkan konflik yang lebih luas yang mungkin menyeret Beijing. Tiongkok juga menentang program nuklir Pyongyang karena khawatir jika ketidakstabilan di Korea Utara memicu intervensi oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan dan menghasilkan Semenanjung Korea yang disatukan kembali di bawah kendali Seoul. Tantangan militer, politik, dan ekonomi Korea yang bersatu bisa menjadi ancaman yang signifikan. Tiongkok tentu akan lebih memilih bahwa semenanjung Korea bebas

dari senjata nuklir dan beranggapan apakah Korea yang bersatu kembali menjadi sekutu Amerika Serikat.

Selain tidak ada perang, tidak ada ketidakstabilan, dan tidak ada nuklir, Tiongkok ingin mencegah kehadiran negara asing yang bermusuhan di sepanjang perbatasan timur lautnya. Korea Utara adalah penyangga yang berguna melawan Korea Selatan, di mana lebih dari 25.000 tentara Amerika Serikat ada di Korea Selatan. Meski demikian, Beijing berharap bisa memperlama keberadaannya di Korea Utara dan memperlakukan sebagai negara merdeka sehingga tidak perlu khawatir dengan potensi penempatan pasukan Amerika lebih dekat ke perbatasannya. Dengan latar belakang munculnya Amerika Serikat ke Asia Timur, Beijing mungkin akan memfokuskan pengaruhnya secara lebih besar lagi untuk membantu Korea Utara (Glaser, 2012:3).

Akhirnya, Tiongkok memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Korea Utara menjadikan negara yang layak secara ekonomi, yang memerlukan penerapan reformasi ekonomi dan membuka diri terhadap dunia luar. Sebuah negara kaya Korea Utara akan menghapus ancaman ketidakstabilan di sepanjang perbatasan Tiongkok dan memberikan kesempatan pengembangan yang lebih besar untuk provinsi-provinsi di timur laut Tiongkok. Dengan menunjukkan keberhasilan reformasi ekonomi Tiongkok untuk mengunjungi pemimpin Korea Utara dan dengan semakin cemas, para pemimpin Tiongkok terus mendesak Korea Utara untuk melakukan langkah-langkah reformasi ekonomi yang serius (Glaser, 2012:3).

Kepentingan Jepang sepanjang sejarahnya, Jepang selalu tertarik dan peduli dengan Semenanjung Korea, secara politis, ekonomi, dan budaya. Orang Jepang telah hidup dengan nasi yang dibawa dari Korea pada periode/zaman Yayoi (pada abad ke 8 sebelum masehi). Sejak pembagian Semenanjung Korea, strategi besar Jepang adalah untuk mencegah Semenanjung Korea menjadi terbagi-bagi. Hal ini telah terlihat melalui kebijakan jarak jauh tahun 1970an atau lebih spesifik Jepang selalu memberi bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi pasca Perang Dingin untuk menopang rezim Korea Utara. Kepentingan pertama, Jepang selalu mencoba berhubungan secara khusus dengan Korea yang bekerja untuk keuntungan keamanan Jepang di wilayah tersebut. Kedua, Jepang selalu melihat kebijakan Korea tertanam dalam konteks yang lebih besar dari keseimbangan kekuatan daerah. Dulu setiap keputusam di ambil didasarkan pada dominasi militer sepihak dari Semenanjung Korea. Hari ini, setiap keputusan didasarkan pada keselarasan dan kerja sama dalam konteks hubungan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Poin yang dilihat di sini adalah bahwa tidak satu pun dari tujuan ini secara logis menentukan penentangan Jepang terhadap Semenanjung Korea yang bersatu di abad ke 21 (Song, 2016:151-152).

Apa yang terjadi dalam sejarah terdahulu tidak menjadikan Jepang dan Korea dalam suatu masalah/konflik yang berkelanjutan, ini adalah strategi besar bagi Jepang yang tidak berprasangka buruk terhadap penyatuan Semenanjung Korea, namun secara aktif dalam mengejar hasil penyatuan yang sesuai dengan keuntungan Jepang dalam distribusi kekuasaan regional. Ini berarti Jepang mendukung Korea selatan bukan karena Tokyo ingin mempertahankan

Semenanjungnya terbagi, namun karena ingin melindungi dan membentuk penyatuan dalam arah yang stabil dan yang menguntungkan Jepang. Apalagi, Jepang mencari lebih banyak kerja sama politik dan militer dengan Korea Selatan bukan karena dengan hati-hati merencanakan kesempatan untuk mengulang sejarah. Sebaliknya, karena dalam jangka panjang ada kesadaran bahwa kepercayaan, dan transparansi pada saat ini hanya dapat menguntungkan keamanan Jepang di bawah permasalahan yang terjadi di Semenanjung Korea dan ini perspektif yang sangat realis tapi juga optimis (Glaser, 2012:2).

Kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea hampir sama dengan kepentingan Tiongkok namun sangat berbeda dalam prioritas. Amerika Serikat menekankan prioritas denuklirisasi Semenanjung Korea. Mencegah proliferasi teknologi nuklir dan rudal ke negara bagian lain dan aktor non-negara adalah kepentingan penting Amerika Serikat (Glaser, 2012:3).

Amerika Serikat juga berbagi kekhawatiran dengan Tiongkok bahwa senjata nuklir Korea Utara pada akhirnya dapat mendorong negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, untuk mengembangkan teknologi nuklir. Perkembangan proliferasi horizontal semacam ini bukanlah perhatian yang mendesak bagi Washington atau Beijing, karena keduanya percaya bahwa baik Tokyo maupun Seoul kemungkinan akan kehilangan kepercayaan kepada Amerika Serikat dalam jangka waktu dekat (Glaser, 2012:4).

Sementara Tiongkok tidak melihat kemampuan nuklir tetangganya di timur laut sebagai ancaman terhadap negaranya sendiri, Amerika Serikat mengaku semakin khawatir bahwa program nuklir Korea Utara dengan cepat menjadi

ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. Dalam sebuah kunjungan ke Tiongkok pada bulan Januari 2011, mantan sekretaris pertahanan Robert Gates meramalkan bahwa Korea Utara dalam lima tahun kedepan akan mengembangkan rudal balistik antar benua, hulu ledak nuklir tidak hanya akan mengancam sekutu regional Amerika tetapi juga wilayah Amerika Serikat, sehingga membuat keadaan menjadi berbahaya. Pada bulan Maret 2011, Letnan Jenderal Ronald Burgess, direktur Badan Intelijen Pertahanan, memberi kesaksian bahwa Korea Utara sekarang mungkin memiliki beberapa hulu ledak nuklir berbasis plutonium yang dapat dikirimkan oleh rudal balistik dan pesawat terbang serta sarana yang tidak konvensional (Glaser, 2012:4).

Sejak akhir Perang Korea, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menghalangi serangan Korea Utara terhadap sekutu Amerika Serikat, terutama Korea Selatan. Jika Pyongyang melakukan serangan mendadak ke Selatan, peluru kendali roket jarak jauh, peluncur roket, dan sistem persenjataan lainnya akan menghancurkan daerah perkotaan di mana 25 juta orang berada dan menimbulkan malapetaka pada ekonomi Korea Selatan. Jepang juga terancam oleh program nuklir dan rudal Korea Utara, karena kepulauannya berada dalam jangkauan jarak jauh rudal nodong dan jarak jauh Pyongyang. Dalam surat kabar pertahanan mutakhir, Jepang menggambarkan program senjata nuklir Korea Utara sehubungan dengan kemampuan rudal balistiknya sebagai sebuah ancaman serius bagi keamanan Jepang. Untuk memperkuat pencegahan dan memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan dan Jepang, Amerika Serikat telah meningkatkan latihan militer bilateral dan trilateral dan bekerja secara terpisah

dengan Tokyo dan Seoul untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal mereka (Glaser, 2012:4).

Amerika Serikat berbagi visi dengan Korea Selatan tentang Korea yang bersatu kembali di bawah kendali Seoul. Dalam sebuah diskusi mengenai reunifikasi Korea, mantan duta besar Amerika Serikat Kathy Stephens mengartikulasikan keinginan Amerika Serikat untuk kemakmuran bersama, perdamaian bersama dan stabilitas yang sejati, Kathy menambahkan bahwa kami mendukung penyatuan kembali dengan cara damai dan sesuai dengan keinginan rakyat Korea. Komitmen Amerika Serikat terhadap penyatuan kembali Korea juga secara resmi dinyatakan dalam pernyataan bersama Korea Selatan. Meskipun isu nuklir telah mendominasi kebijakan Amerika Serikat terhadap Pyongyang, pejabat Amerika Serikat secara berkala menyuarakan keprihatinan mendalam tentang catatan hak asasi manusia Korea Utara yang tidak bermoral. Laporan tahunan tentang hak asasi manusia Korea Utara yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri mengungkapkan gambaran pelanggaran HAM secara signifikan yang tidak berubah. Pada tahun 2011, program pangan dunia memperkirakan bahwa seperempat dari populasi Korea Utara menghadapi kekurangan pangan yang parah. Pemerintahan Obama telah mengidentifikasi perlindungan hak asasi manusia, memastikan bahwa penduduk Korea Utara dirawat dengan baik, dan mengejar reformasi ekonomi dan politik sebagai prasyarat utama untuk memperbaiki hubungan bilateral. Penekanan pada isu-isu sosial dan reformasi tidak boleh dikaitkan dengan keinginan Amerika Serikat untuk perubahan rezim di Pyong Yang. Amerika Serikat sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka

bersedia untuk bekerja sama dengan Korea Utara dan menyambutnya ke masyarakat internasional, dengan anggapan bahwa pihaknya berfokus untuk menghormati komitmen dan bergabung kembali dengan masyarakat internasional (Glaser, 2012:4).

Sebagaimana dicatat, kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok di Semenanjung Korea tidak sepenuhnya sesuai. Negara tetangga melihat kepentingannya dimulai oleh sebuah konflik militer, dan kedua negara menentang program senjata nuklir Korea Utara. Beijing sangat kurang mementingkan penyediaan hak asasi manusia untuk rakyat Korea Utara, meskipun memiliki ketertarikan kuat terhadap pelaksanaan reformasi ekonomi. Denuklirisasi sangat penting bagi Amerika Serikat, namun Tiongkok memberantas senjata nuklir sebagai prioritas yang tidak terlalu penting dan akan mengejar tujuan itu hanya dengan cara yang tidak akan mengancam perdamaian dan stabilitas (Glaser, 2012:3).

Kepentingan Amerika Serikat di bidang ekonomi adalah Korea Selatan merupakan sumber keuntungan yang sangat besar bagi industri senjata Amerika. Selama beberapa tahun terakhir Korea Selatan menjadi Importir senjata terbesar ke empat di dunia dengan Amerika Serikat mendapatkan 77% dari pembelian senjata. Harus dicatat bahwa senjata-senjata ini di beli dengan Won dari pembayaran pajak negara Korea Selatan (Kamasa, 2016:298).

Dalam menangani isu nuklir Korea Utara, strategi ekonomi yang dijalankan oleh Amerika Serikat adalah salah satunya dengan memanfaatkan kekuatan

ekonomi internasionalnya, yaitu melalui penerapan sanksi ekonomi internasional terhadap Korea Utara yang disahkan oleh *U.N. Security Council*.

Di sektor militer, kerjasama militer antara Arnerika Serikat dengan Korea Selatan. Berpijak pada kepentingan nasional Amerika Serikat menjadi alasan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk memainkan perannya yang signifikan di dunia internasional untuk ikut terlibat dalam menangani isu nuklir Korea Utara. Peran Washington itu terwujud dalam pembuatan kebijakan politik luar negerinya *(U.S. foreign policy*) yang tentu saja dibuat untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat di regional Asia Timur khususnya (Sinaga, 2008:6).

Di bidang politik, Amerika Serikat menilai Korea Utara sebagai poros kejahatan dan ancaman perdamaian dunia. Menurut Amerika Serikat, Korea Utara mengancam ketenangan masyarakat Asia Timur dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan juga terhadap komitmen Korea Utara sendiri. Namun sesungguhnya itu adalah strategi politik untuk mengelabui, sehingga Korea Selatan dan Jepang benar-benar menganggap Korea Utara sebagai ancaman sehingga Amerika Serikat memiliki alasan untuk mempertahankan ribuan pasukannya di Semenanjung Korea. Hadirnya Amerika Serikat di kawasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hegemoni suatu negara di kawasan ini. Satu negara yang dikhawatirkan adalah Tiongkok melihat dari kemajuan militer Tiongkok yang signifikan dan juga peran Tiongkok yang semakin menguat dalam setiap eskalasi konflik dengan negara-negara sekitar seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Sengketa Pulau Senkaku/Diayou dengan Jepang. Amerika Serikat melihat Tiongkok sebagai ancaman terbesar langkah geopolitik Amerika

Serikat dengan beraliansi dengan Korea Selatan adalah sebuah langkah jangka panjang untuk lebih menyeimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan (Sinaga, 2008:6).

Penelitian yang membahas mengenai Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea adalah skripsi tahun 2012 oleh Lilis Widyasari yang berjudul *Dinamika Hubungan Korsel-Korut dalam Mewujudkan Reunifikasi di Semenanjung Korea Periode 2003-2008* dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada skripsi tersebut di jelaskan upaya kedua negara dalam mewujudkan reunifikasi di Semenanjung Korea. Perbedaan tulisan tersebut adalah masalah yang diteliti,dalam skripsi tersebut di teliti dinamika hubungan antara Korut dan Korsel dalam mewujudkan reunifikasi di Semenanjung Korea 2003-2008 sementara masalah yang di teliti dalam skripsi ini adalah aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea 2010-2016.

Penelitian lain adalah jurnal tahun 2013 oleh Isna Hartati yang berjudul *Implementasi Kerjasama Pertahanan antar Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Kerangka Proliferation Security Initiative*, Fisipol, Unmul, Samarinda. Pada jurnal ini berisi tentang gagasan yang bertujuan untuk mencegah atau meluasnya senjata pemusnah masal atau *weapon of mass destruction* yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan dunia. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah masalah yang di teliti dimana di jurnal ini dijelaskan kerjasama pertahanan

keamanan AS dan Korsel dalam menghadapi ancaman senjata nuklir dari Korea Utara terhadap kestabilan kawasan Semenanjung Korea. Sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti ada mengenai aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea 2010-2016.

Penelitian lain adalah thesis tahun 2015 oleh M Najeri Al Syahrin, program studi S2 ilmu hubungan internasional UGM yang berjudul *kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur dan implikasinya terhadap peningkatan kekuatan senjata nuklir Korea Utara,* thesis ini bertujuan untuk meneliti implikasi kompleksitas keamanan kawasan terhadap peningkatan program pengembangan nuklir Korea Utara. Aspek-aspek pembentuk kompleksitas keamanan, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan, dan hubungan *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan), erimplikasi pada terbentuknya dilema keamanan. Sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea 2010-2016.

Penelitian lain berjudul *Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan: Kebijakan Extended Deterrence terhadap Stabilitas Keamanan Korea Selatan (2005-2010)* oleh Irmawan Effendi dari Universitas Indonesia. Thesis ini membahas tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memeberikan perhatian khusus pada kredibilitas kebijakan *extended deterrence*, sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai aliansi militer

Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea 2010-2016.

Adapun alasan peneliti memilih topik penelitian ini karena peneliti tertarik untuk meneliti tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea 2010-2016. Selain itu, peneliti juga tertarik meneliti mengenai permasalahan yang terjadi di Semenanjung Korea karena permasalahan ini sudah lama terjadi dan belum menemukan jalan keluar sampai sekarang meskipun sudah banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini.

Maka berkaitan dengan itu peneliti menyusun proposal untuk penelitian skripsi dengan judul:

"Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016)".

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Studi Keamanan Internasional

   Dalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari mengenai masalah keamanan internasional yang membahas tentang masalah keamanan di suatu negara yang terkait dengan keamanan di Semenanjung Korea yang diklaim oleh dua negara yang saling berkonflik dan mempunyai cara masing-masing untuk menjaga keamanan negaranya.

2. Hubungan Internasional di Asia Timur

   Dalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari tentang permasalahan di negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur yang salah satunya terkait masalah di Semenanjung Korea karena berada di kawasan tersebut.

3. Hubungan Internasional di Amerika

   Dalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan untuk beraliansi dengan Korea Selatan dan hadirnya Amerika Serikat di kawasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hegemoni suatu negara di kawasan ini.

4. *War and Peace*

   Dalam mata kuliah ini, peneliti mempelajari tentang konflik yang terjadi di Semenanjung Korea. Akibat permasalahan dari konflik ini mengarah kepada konflik besar antar beberapa negara adidaya/negara besar yang sampai sekarang belum menemukan bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea (2010-2016)?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea?
2. Apa kendala yang dihadapi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea?
3. Bagaimana perkembangan serta pencapaian dari aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Luasnya ruang lingkup masalah kerjasama aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam mengamankan Semenanjung Korea, mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penelitian ini akan dibatasi dengan mempelajari aliansi militer Amerika serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea pada tahun (2010-2016), sebab pada tahun 2010 kapal laut Korea Selatan jenis Korvet, Cheonan, tenggelam saat melakukan patroli rutin di kawasan *Northern Limit Line* (NLL) yaitu 1 mil dari Pulau Baengnyeong pada 26 Maret 2010 dan pelaku dari kejadian ini adalah Korea Utara. Pada tahun 2016, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal darat jarak menengah Musudan-1 ke ketinggian 1,413 kilometer (878.4 mil) dan dengan jangkauan 400 kilometer (250 mil), dan juga Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam, Pukkuksong-1 ke zona identifikasi pertahanan udara Jepang dengan jangkauan 500 kilometer (310 mil) dan ketinggian yang sama. Korea Utara tengah mengembangkan teknologi untuk dapat melakukan serangan kedua dengan

menggunakan teknologi sistem peluncuran vertikal yang lebih baik dan roket berbahan bakar padat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea, apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan melalui aliansi militernya untuk menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea serta kendala yang dihadapi dan program-program apa yang telah dilakukan dan yang terakhir bagaimana perkembangan serta hasil dari aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea (2010-2016).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti maupun pembaca mengetahui bagaimana aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat-Korea Selatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea.
3. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama aliansi berlangsung.

4. Bagaimana perkembangan dari upaya Amerika Serikat-Korea Selatan dalam menjaga stabilitas keamanan Semenanjung Korea.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh peneliti sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa hubungan internasional pada khususnya dan pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai kajian wilayah Asia Timur, khususnya mengenai krisis Semenanjung Korea.

b. Kegunaan Praktis

   1. Berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan, ilmu, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan pada bidang ilmu hubungan internasional.
   2. Bermanfaat bagi lembaga akademik yaitu sebagai bahan referensi bagi para penstudi ilmu hubungan internasional.
   3. Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan (pemerintah) dalam membuat kebijakan menyangkut penyelesaian krisis Semenanjung Korea.